

RESISTENSI MASYARAKAT PULAU TERHADAP  
PENAMBANGAN PASIR DI PULAU KODINGARENG LOMPO

TRI PUTRI YULIANDARI

E042201001



JURUSAN ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

# RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PULAU KODINGARENG LOMPO

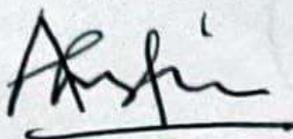
Disusun dan diajukan oleh

**TRI PUTRI YULIANDARI**  
E042201001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Antropologi Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **25 Agustus 2022**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

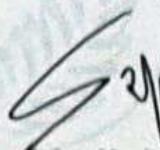
Menyetujui

Pembimbing Utama,



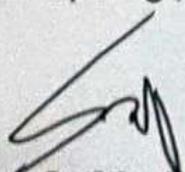
**Prof. Dr. Ansar Arifin, M.S**  
NIP : 196112271988111002

Pembimbing Pendamping,



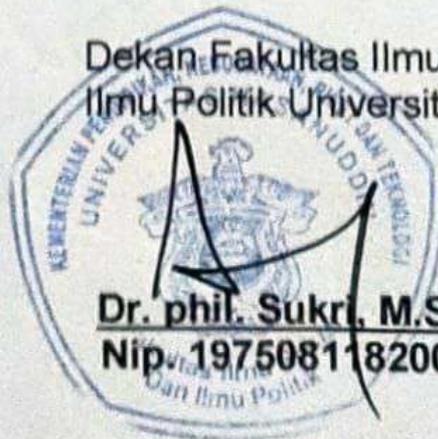
**Dr. Safriadi, M.Si**  
NIP : 197406052008121001

Ketua Program Studi S2  
Antropologi,



**Dr. Safriadi, M.Si**  
NIP : 197406052008121001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Dr. phil. Sukri, M.Si**  
Nip. 197508118200811008

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Putri Yuliandari  
NIM : E042201001  
Angkatan : 2020 Ganjil  
Program Studi : S2 Antropologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir Tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelas Master akademik di Universitas Hassanuddin, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh perserorangan dan lembaga lain, kecuali yang tertera dan di sebutkan sumbernya secara lengkap pada daftar pustaka

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsuk plagiasi dan apabila Tugas Akhir ini dikemudian hari terdapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis akan bertanggung jawab penuh akan hal tersebut.

Makassar, 18 Oktober 2022



TRI PUTRI YULIANDARI

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim. Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkah, anugerah, kemudahan, kasih, dan talenta yang diberikanNYA selama melalui proses yang panjang dan bisa dikatakan membuat penulis menyerah. Namun karena petunjuk dan kekuatan yang diberikanNYA, menumbuhkan kembali semangat penulis untuk tetap meneruskan penulisan Tesis ini sehingga dapat rampung sesuai harapan. Namun bagaimana pun juga penulis hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Maka wajarlah bila nantinya para pembaca menemukan kekurangan dalam Tesis ini. Penulis pun berharap para pembaca yang menemukan kelemahan dan kekurangan tersebut dapat memberikan kritik yang membangun untuk penyempurnaan penulisan Tesis ini lebih lanjut. Pada proses penulisan ini banyak pula pihak yang membantu dari awal hingga akhir bahkan setelah menyandang gelar Master Antropologi di Universitas Hanuddin, mereka tetap memberi semangat dan dukungan kepada penulis. Maka sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh informan dan narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam berbagi ilmu yang sangat penulis hargai dan maknai. Oleh karenanya tulisan ini di dedikasikan kepada para informan khususnya Nelayan yang hingga saat ini masih resisten akan kebijakan pemerintah. Tak lupa keluarga yang tak hentiya memberi semangat untuk dapat selalu maju. Juga kepada para pembimbing dan penguji dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan kritik dalam tulisan ini. Saya sebagai penulis mengharapkan bahwa setiap kata dalam tulisan ini dapat bermakna dan memiliki fungsinya sendiri dalam masyarakat.

MAKASSAR, 25 September 2022

TRI PUTRI YULIANDARI



## DAFTAR ISI HALAMAN

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR FOTO.....	vii
ABSTRACT.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	9
3. Tujuan Penelitian .....	9
4. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>12</b>
1. Penelitian Terdahulu .....	12
2. Resistensi .....	16
2.1 Resistensi Terhadap Gerakan Sosial.....	21
2.1.1 <i>Ridicule</i> (Ejekan).....	22
2.1.2 <i>Co-Opting</i> (Kooptasi).....	23
2.1.3 <i>Formal Social Control</i> (Kontrol Sosial Formal)...	24
3. Penambangan Pasir Laut .....	29
3.1 Nelayan .....	29
3.2 Penambangan Pasir Laut .....	31
4. Pinggawa-Sawi.....	34

<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>38</b>
1. Tipe Penelitian.....	39
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
2.1. Lokasi Penelitian .....	41
2.2. Waktu Penelitian .....	42
3. Menetapkan Informan .....	39
4. Teknik Pengumpulan Data .....	40
2.1 Observasi .....	43
2.2 Wawancara ( <i>Indept Interview</i> ) .....	43
2.3 Analisis Data .....	44
<b>BAB IV Pulau Kodingareng Lompo .....</b>	<b>47</b>
1. Letak Geografis .....	47
2. Keadaan Alam .....	54
3. Kependudukan .....	56
4. Sarana dan Prasarana .....	60
5. Mata pencaharian.....	63
<b>BAB V Resistensi .....</b>	<b>66</b>
1. Resistensi di Pulau Kodingareng Lompo .....	66
2. Fase Perlawanan .....	68
2.1 Pembentukan Wacana dan Konsolidasi .....	76
2.2 Aksi Fisik .....	77
2.2.1 Demonstrasi di Laut .....	77

2.2.2 Demonstrasi di Darat .....	80
2.3 Negosiasi .....	86
<b>BAB VI Aktor .....</b>	<b>98</b>
1. Aktor Dalam Pulau Yang Terlibat .....	98
1.1 Tokoh Masyarakat .....	101
1.2 Pemerintah Setempat .....	104
1.3 Tokoh Terpelajar .....	108
1.4 Punggawa .....	114
2. Keterlibatan Aktor Luar dalam Terjadinya Resistensi .....	115
2.1 NGO (Non Government Organisation) .....	115
2.2 LBH (Lembaga Bantuan Hukum).....	124
2.3 Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan .....	126
2.4 Polairud .....	129
<b>BAB VII Konsekuensi dari Resistensi.....</b>	<b>113</b>
1. Konsekuensi Ekonomi dari penambangan dan kegiatan penolakan.....	113
2. Konsekuensi sosial dari resistensi masyarakat.....	143
3. Konsekuensi lingkungan dari penambangan pasir.....	156
3.1. Hilangnya tempat berkembang biak ikan tenggiri...	157
3.2. <i>Visibility</i> (Jarak Pandang).....	159
3.3. Penyakit baru yang timbul pada nelayan.....	161
3.4. Rusaknya terumbu karang.....	162
3.5. Abrasi.....	162
<b>BAB VIII Kesimpulan dan Saran.....</b>	<b>165</b>
1. Kesimpulan.....	165

2. Saran.....	166
Daftar Pustaka.....	167

## Daftar Foto

Foto 1	: ABK yang menyelipkan badannya diantara barang milik penumpang ...	36
Foto 2	: Kapal <i>pete-pete</i> / <i>palimbang</i> .....	49
Foto 3	: Warga Pulau Kodingareng menyewa kapal .....	50
Foto 4	: Kondisi kapal sedang bersandar di dermaga kayubangkoa.....	52
Foto 5	: Peta Infrastruktur Kelurahan Kodingareng.....	52
Foto 6	: Keadaan Pulau Kodingareng Lompo diambil dari atas udara... ..	95
Foto 7	: Pemandangan Gusung dan mercusuar Pulau Kodingareng.....	59
Foto 8	: Masjid yang berada di ujung dermaga.....	62
Foto 9	: Masjid raya di tengah pulau kodingareng.....	62
Foto 10	: Hasil Tangkap Ikan Tenggiri.....	68
Foto 11	: Nelayan Pulau Kodingareng sedang memperbaiki jaring .....	72
Foto 12	: warga berjalan bersama menuju kantor DPRD Provinsi Sul-Sel.....	140
Foto 13	: Masyarakat saat melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur....	142
Foto 14	: Spanduk yang dibuat masyarakat pulau kodingareng .....	152
Foto 15	: Spanduk yang dibentangkan oleh masyarakat kodingareng.....	154
Foto 16	: Pembentangan Spanduk disejumlah titik di Kota Makassar.....	155
Foto 17	:Dampak dari penambangan pasir 2018 yang berada di pesisir Takalar ...	160

## **Daftar Tabel**

Tabel 1	: Luas wilayah menurut kelurahan di kecamatan sangkarang tahun 2019.....	58
Tabel 2	: Jumlat rt rw rumah tangga dan penduduk menurut kelurahan tahun 2019.....	59
Tabel 3	: Jumlah sekolah negeri menurut kelurahan tahun 2019.....	60
Tabel 4	: Jumlah sekolah tingkat swasta menurut tingkatnya tiap kelurahan .....	61

## ABSTRACT

**TRI PUTRI YULIANDARI.** *Community Resistance Against Sea Sand Mining on Kodingareng Lompo Island* (supervised by Ansar Arifin and Safriadi)

This study aims to find out (1) the resistance of fishermen in refusing sand in fishing areas, (2) the participation of internal and external actors in each resistance carried out by fishermen, and find out every resistance that occurs with consequence following it. In relation to the community of Kodingareng Lompo Island, and (3) the consequences of community resistance of Kodingareng Lompo Island in every resistance happening.

This study is a qualitative research with an ethnographic study on the coastal community of Kodingareng Lompo Island on the existence of marine sand mining on Kodingareng Lompo Island. The primary data were obtained from in-depth interviews with fishermen and stakeholders, while secondary data were obtained from related documents to support primary data as well as news published in several media. The data were analyzed using the approach proposed by Weber (1947) on hegemony, Scott (1972) on upheaval, and subsistence.

The results of this study indicate that (1) resistance does not arise directly from individuals but it has resistance phases that are carried out by the community starting from consolidation to negotiations in sea sand mining; (2) the participation of actors in the actions are taken by fishermen, and (3) the consequences of resistance involve economic, social, and ecological factors for the people of Kodingareng Lompo Island.

**Keywords:** sea sand mining, resistance, actor, Kodingareng Lompo



# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Industri pertambangan merupakan salah satu jenis industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk dapat memperoleh pendapatan negara, terutama dalam bentuk pajak. Namun di sisi lain, jenis industri ini selalu menuai masalah terutama gesekan dengan masyarakat setempat. Gesekan dapat terjadi karena wilayah pertambangan berdampak buruk pada masyarakat sekitar, seperti wilayah tambang menjadi tanah sengketa dengan warga, atau masyarakat tidak merasakan manfaat atas kehadiran perusahaan di wilayahnya. Seperti kasus yang mengalih fungsikan sungai yang awal mulanya dimanfaatkan sebagai pemenuhan sosial ekonomi juga sebagai sarana transportasi oleh warga Sungai Kuin di Banjarmasin kini berubah karena kehadiran beberapa perusahaan penambang pasir dengan menggunakan mesin yang menyebabkan kerusakan ekologi dan kerugian sosial ekonomi bagi warga sekitar. Sehingga membuat tanah longsor hingga berkurangnya ketersediaan air akibat kerusakan tanah yang ditimbulkan dari penambangan pasir dan disfungsi sungai yang lainnya (Arsal 2014). Hampir disetiap daerah yang sumber daya alamnya tereksplotatif akan diikuti oleh resistensi warga yang juga memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Resistensi akan penambangan pasir yang diangkat sebagai penelitian lebih sering terjadi di bidang agrari terlihat pada penelitian yang pernah

diteliti sebelumnya, Widyastomo (2013) Suliadi (2015) Fringka (2016) dan Setiawan (2019). Penambangan di daratan (penelitian terdahulu) memang menjadi primadona perusahaan-perusahaan penambang karena akses yang mudah dijangkau juga material yang mudah diperoleh. Seperti pengelolaan sumber daya alam dibidang pertambangan galian C di Kabupaten Nagan Raya (Setiawan 2019) menjadi sasaran empuk bagi pemilik tambang untuk mengeksploitasi karena dapat diakses dengan mudah dengan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya walaupun masyarakat di Kabupaten Nagan Raya memperoleh dampak yang negatif maupun positif akan kehadirannya (perusahaan penambang) namun resistensi di wilayah tersebut tetap ada. Lalu resistensi yang berbasis adat adalah perlawanan masyarakat adat nagari di Provinsi Sumatera Barat terhadap rencana tambang Bukit Batubasi oleh pemerintah, pada kasus ini terdapat sejumlah aktor yang berperan atas terjadinya resistensi (Fringka 2015).

Dari beberapa kasus resistensi akan penambangan pasir diatas lebih menitik beratkan akan penolakan yang dilakukan masyarakat karena adanya kegiatan penambangan. Pengelolaan sumber daya alam yang sebelumnya telah dimanfaatkan secara bersama demi kepentingan umum maupun pribadi menjadi polemik tersendiri terlebih kedatangan perusahaan luar yang didukung oleh negara menjadikan masyarakat merasa dikesampingkan hak nya untuk sama-sama menggunakan wilayah tersebut. Bagaimana selama terjadinya proses penambangan banyak

fenomena alam secara spontan merespon kegiatan eksploitasi sumber daya alam ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerusakan lingkungan akan berdampak pada pemukiman terdekat sehingga wajar saja jika saat ini mereka merasa terancam dan melakukan resistensi.

Hal ini menjadikan penelitian tentang resistensi masyarakat akan penambangan pasir penting dan mendesak untuk segera dikaji. Apa lagi penambangan pasir yang terjadi di Indonesia sedang menjamur diberbagai kota besar Indonesia dan menarik perhatian banyak NGO dalam negeri dan luar yang bergerak dibidang advokasi lingkungan dan masyarakat. Sehingga ketertarikan dalam bidang antropologi dalam melihat benang merah akan resistensi masyarakat dan keikutsertaan NGO menarik untuk lebih didalami lagi.

Salah satu bentuk konflik masyarakat dengan perusahaan pertambangan terjadi di Kabupaten Takalar pada Tahun 2017. Masyarakat Galesong menuntut penghentian kegiatan penambangan pasir laut yang berada dekat dengan pulau berpenghuni sekitar 2-3 mil (hitungan 1 mil = 1.60934 Km). Konflik tersebut berakhir dengan pemberhentian sementara kegiatan pertambangan pasir tersebut dan kemudian pemindahan lokasi pengerukan pasir menjauhi wilayah pesisir Kab. Takalar namun masih berada dalam wilayah perairan Kab Takalar. Sebagai antisipasi terhadap kejadian serupa di masa depan, pemerintah provinsi menerbitkan RZWP-3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) sebagai aturan untuk memperkuat keputusan perizinan penambangan

pasir laut di wilayah Sulawesi Selatan dengan masa berlaku selama 5 tahun dimulai dari pembuatan peraturan tersebut. Akhirnya pada tahun 2019 penambangan pasir tersebut kembali beroperasi dengan mengacu pada kebijakan baru yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat.

Masalah yang kemudian timbul adalah wilayah pengerukan pasir ternyata bergeser mendekati pulau Kodingareng, yaitu sekitar 8 mil di arah selatan pulau tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat nelayan kodingareng akhirnya terseret ke dalam konflik tersebut, sementara masyarakat nelayan Takalar tidak lagi terlibat. Tentunya hal ini menjadi lebih dilematis, karena perusahaan memiliki dasar kuat untuk beroperasi dan wilayah pengerukan masih dalam wilayah Kab. Takalar, sementara nelayan Kodingareng tidak mendapatkan pembelaan dari pemerintah kota karena pengerukan bukan di wilayah Makassar.

Segala upaya menyamakan persepsi dilakukan oleh masyarakat Pulau Kodingareng Lompo, mulai dari dialog hingga protes langsung disamping kapal besar pun terjadi beberapa kali demi mendesak dilakukannya pembicaraan untuk memperoleh kesepakatan bagi penyelesaian masalah ini. Dalam proses dialog dan Demonstrasi yang berlangsung, nampaknya tidak saja diikuti oleh masyarakat Pulau Kodingareng Lompo tetapi juga beberapa aktor yang memiliki kepentingan tersendiri. Memang resistensi tidak semata-mata keinginan dari nelayan, akan tetapi hal ini terjadi karena dorongan aktor yang lebih mengetahui kondisi yang terjadi saat ini.

Curhatan yang merujuk kepada protes sawi ke punggawa menjadikan nelayan berdiskusi dan mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian yang terjadi saat ini dirasakan oleh beberapa nelayan. Tokoh masyarakatlah yang pertama menyampaikan tuntutan kepada pemerintah setempat yakni Pak Lurah sebagai aparat pemerintah terdekat di Pulau Kodingareng Lompo, akan tetapi respon yang diberikan tidak menyelesaikan masalah sehingga munculah beberapa aktor baru seperti perwakilan pelajar yang berasal dari Pulau Kodingareng Lompo, juga punggawa yang memiliki pengaruh besar karena sering didatangi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai penyalur bantuan dari Pemerintah (Dinas Perikanan dan Kelautan) di Pulau menjadikan mereka menyamakan visi dan melakukan Demonstrasi di Laut. Demonstrasi ini menarik perhatian media, beberapa wartawan daerah berdatangan mendramatisir masalah ini sehingga mengundang rasa simpatik oleh masyarakat Kota Makassar.

Tidak hanya itu ketika terjadi sebuah penolakan maka rentan akibatnya bentrok, oleh karena itu LBH (Lembaga Bantuan Hukum) diikuti oleh NGO (*Non-Governmental Organization*) juga menyebut dirinya sebagai advokasi lingkungan dan masyarakat. Sehingga resistensi ini menjadi paket komplit yang dirasa dapat mendapatkan titik terang dalam melakukan penolakan ke pemerintah. Namun, berjalannya waktu pemerintah tidak diam dalam merespon warganya yang menolak proyek berskala nasional ini. Penertiban seperti mengusir nelayan ketika demonstrasi, mereka (Polairud)

mengancam hingga menangkap beberapa nelayan dan pendamping yang berasal dari NGO. Kekesaran dalam demonstrasi memang sudah menjadi hal yang sering ditemui, terlebih jika kondisi saat mengeluarkan aspirasi tidak terkendali atau tidak mendapat respon yang sesuai dengan ekspektasi massa yang melakukan demonstrasi. Penangkapan hingga pengrusakan kapal yang dilakukan Petugas juga tidak dibenarkan, karena pada dasarnya ketika aspirasi masyarakat pulau kodingareng disampaikan masa petugas keamanan hanya dapat memberikan pengamanan dan peringatan dengan damai tanpa merugikan pihak manapun.

Bantuan menyebarkan berita dari berbagai media membuat nelayan yang ditangkap dibebaskan bahkan diberikan bantuan uang untuk mengganti penghasilan selama masa tahanan. Lalu tuntutan yang masih diorasikan masyarakat Pulau Kodingareng Lompo untuk mendapatkan keadilan, kali ini anggota DPRD Provinsi merespon dengan memanggil beberapa perwakilan nelayan untuk duduk di RDP (Ruang dengar pendapat). Setelah RDP tingkah laku aktor yang mengikut sertakan dirinya sebagai perwakilan suara tidak lagi banyak berbicara tentang penolakan penambangan. Mereka yang dulunya berteriak "*Pulau Kita akan tenggelam karena Kapal Boskalis*" seolah tersihir setelah pertemuan dengan para anggota dewan. Hal ini menjadi menarik karena entah karena apa aktor yang mendukung terjadinya resistensi menjadi diam seribu bahasa ketika ditanya apa hasil dari diskusi yang telah dilakukan. Lantas masyarakat yang terlanjur terbakar semangat menjadi *lost trust* dan kehilangan sosok

pemimpin. Layaknya kapal tanpa nahkoda kurang lebih seperti itulah situasi masyarakat yang ingin mempertahankan pulau kodingareng tetapi tidak mengetahui cara untuk memberontak.

Hilangnya kepercayaan akan aktor lokal membuka peluang NGO sebagai aktor luar / bukan berasal dari Pulau seperti salah satu kelompok Wahana Lingkungan Hidup menjadi salah satu pilar dalam kegiatan penolakan yang diagendakan ulang. Tidak hanya sebagai advokat lingkungan tetapi muncul sebagai kerabat yang seolah-olah merasakan bagaimana penderitaan yang selama ini nelayan rasakan. Berbagai macam advokasi dilakukan yang menimbulkan nama NGO X ini kemudian naik kepermukaan dan dilihat sebagai NGO berpengaruh. Tidak hanya warga Kota sebesar Makassar saja tetapi NGO berbasis wahana lingkungan di Sul-Sel mengepakkan sayapnya keluar daerah ketika namanya sudah mulai dilirik masyarakat. NGO X dapat dikatakan sebagai *freerider* yang memanfaatkan kesempatan untuk dapat kepentingan pribadi dalam resistensi yang dilakukan nelayan kodingareng.

Berbagai masalah internal yang pernah terjadi di Pulau Kodingareng Lompo tidak pernah keluar dari ruang lingkup tokoh masyarakat dan punggawa. Resistensi kali ini sangat menarik karena masyarakat pesisir menjadi eksis dirana yang bukan menjadi kebiasaannya sehingga adanya perubahan perilaku dan pola pikir yang membuat masyarakat menjadi termordenisasi dengan keadaan. Pulau yang awalnya damai dan jauh dari masalah luar saat ini menjadi Pulau dengan kecemasan yang sangat tinggi.

Ketakutan yang tidak terjadi begitu saja, campur tangan NGO yang menunjukkan efek dari penambangan pasir yang akan menimpah Pulau adalah hal pokok yang selalu disebut ketika berorasi. Kerugian terus terjadi, rumah yang terbangun akan roboh karena abrasi, penghasilan yang tidak tetap menjadikan nelayan mau tidak mau menerima bantuan dari NGO X sebagai harapan yang saat ini.

Terlebih lagi sebelum dan setelah resistensi yang dilakukan mengakibatkan berbagai macam masalah baru yang belum pernah dihadapi oleh masyarakat pesisir. Sehingga perjuangan dirasa sudah setengah jalan dan harus dituntaskan demi mendapatkan keadilan yang diharapkan masyarakat yang masih resisten akan penambangan pasir. Terlebih lagi NGO yang masih membantu hingga saat ini secara materi dan moral disekitar masyarakat Pulau Kodingareng Lompo menjadikannya terikat secara emosional dan secara ekonomi, dalam hal ini NGO yang masih terikat dalam program advokasi nelayan menjaga semangat dalam menolak kehadiran penambang pasir. Namun masyarakat yang bersikap diam juga tetap resisten dengan caranya, menunjukkan penolakan tidak seperti pengikut NGO X tetapi dengan tidak menerima sejumlah bantuan dan memperbaiki diri dengan mencari solusi lain dalam menghadapi masalah.

Perlunya perhatian lebih dalam melihat karena hubungan yang tidak biasa terbangun dimasyarakat pesisir, oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat penting di lakukan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi

dan bagaimana bentuk resistensi masyarakat pulau terhadap penambangan pasir. Fenomena yang dimaksud sebagai resistensi yang terjadi di Pulau Kodingareng Lompo, merupakan hasil studi terkait rumusan masalah dalam penelitian ini. Sebagaimana termuat dalam sub berikutnya.

## **2. Rumusan Masalah**

Dalam perjalanannya untuk mengerti jenis penolakan yang terjadi dimasyarakat Pulau Kodingareng Lompo maka perlunya dilakukan pendalaman dalam mengenal tujuan dari aktor-aktor yang mengikut sertakan dirinya. Tidak hanya berperan pada ranah advokasi tetapi juga menjadi satu kesatuan dari lingkungan nelayan. Maka dengan itu, aktor menjadi hal utama yang saya lihat sebagai pembuka penelitian ini yang diharapkan hasil dari tulisan ini mengimplikasikan tiga pertanyaan.

1. Bagaimana fase-fase terbentuknya resistensi yang dilakukan oleh Masyarakat Pulau Kodingareng Lompo
2. Siapa saja aktor yang berperan dalam melakukan resistensi terhadap penambangan pasir di Pulau Kodingareng Lompo?
3. Apa saja dampak dari pertambangan yang diasakan nelayan dan konsekuensi dari resistensi yang dilakukan masyarakat pulau Kodingareng Lompo?

### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ingin mengurai benang merah atau menyikap tabir tentang pemahaman masyarakat Pulau Kodingareng Lompo yang

melakukan resistensi terhadap penambangan pasir Dengan memusatkan perhatian pada tindakan aktor dalam membantu mengadvokasi masyarakat untuk mendapatkan hak nya. Resistensi yang terjadi oleh nelayan ini membutuhkan interpretasi lebih lanjut mengenai aktivitas, dan konsekuensi yang mereka hadapi sehingga penelitian ini diharapkan dapat menemukan jaringan makna yang dapat membantu memahami persoalan yang dihadapi masyarakat Pulau.

Seorang teman pernah berkata “Ibarat sebuah jendela yang tertutup rapat, saya ingin menggeser dan memberikan ruang atau cela sekecil apapun untuk memasukkan udara sejuk, dan menyegarkan suasana pengap yang ada dalam ruangan, walaupun kemudian orang lain berusaha menutup jendela itu dengan berbagai alasan”. Dalam ungkapan ini diharapkan memberikan penambangan pengertian fenomena yang terjadi dinelayan juga sangat kompleks dan menarik untuk diteliti.

Sehingga masyarakat pesisir dapat dijadikan sebagai salah satu “*Part of the Picture*” objek penelitian yang menarik untuk diteliti dan memperdayakan masyarakatnya. Mengingat salah satu tugas dan kewajiban seorang mahasiswa merupakan agen perubahan. Ini tidak berarti ingin mengangkat derajat sendiri, tapi saya ingin berusaha memberikan pemahaman tentang makna hidup manusia. Dengan penelitian ini pula, saya berharap akan mampu memberikan makna baru dalam kemajuan pengetahuan dibidang Antropologi maritim. Oleh karenanya penelitian ini diharapkan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis dan memahami bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat pulau kodingareng lompo terhadap penambangan pasir

2. Menganalisis dan memahami aktor-aktor yang mengikut sertakan dirinya pada resistensi yang dilakukan masyarakat pulau kodiangareng lompo

3. Menganalisis dan memahami konsekuensi yang didapatkan dari bentuk yang terjadi di Pulau Kodingareng Lompo

### **3. Manfaat Penelitian**

Secara akademis penelitian ini diharapkan untuk memperluas pengetahuan tentang bagaimana masyarakat pesisir melakukan resistensi dalam menyikapi bentuk perubahan budaya sehingga dapat melihat kemaju yang terjadi. Namun tidak terlepas dari berbagai macam advokasi yang diberikan pihak-pihak yang mengatas namakan dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan pengetahuan antropologi maritim dalam melihat contoh-contoh penolakan yang terjadi dimasyarakat pesisir khususnya di Kota Makassar. Dan yang terakhir sebagai syarat kelulusan dan Program Studi Pasca Sarjana jurusan Antropologi Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi teman-teman akademis untuk dapat melanjutkan topik maupun memajukan lokasi penelitian agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan.

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

Peran pemimpin didalam konteks mereka harus menempuh keseimbangan yang rapuh antara kehormatan (Respek) dan nama baik (Reputasi) disatu pihak dan ambisi pribadi dan pengikut-pengikut dilain pihak (Karen J. Brison 2012)

#### **1. Penelitian Terdahulu**

Ada sedikit faktor kesengajaan dalam menulis tinjauan pustaka diakhir dari penelitian ini, entah karena saya masih fokus untuk menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian ini ataukah karena analisis data yang berada diakhir penelitian sehingga bacaan di awal proposal hingga saat penulisan ini terjadi masih adanya ketergantungan dan baru terselesaikan saat analisis data. Oleh karenanya beberapa penelitian sebelumnya Scott (1990) perlawanan tertutup dan terbuka , Ezi Astuti (2012) dengan pro dan kontra pertambangan pasir , Widyastomo (2013) pengaruh pertambangan terhadap kondisi sosial ekonomi , Erwin (2015) resistensi politik masyarakat terhadap korporasi ,dan beberapa penelitian lainnya yang menyinggung akan perlawanan dan penolakan penambangan pasir diantaranya Yulisa (2015), Suliadi (2015), Khusna (2016), Nazir (2017), Nurdiah (2017), Naingolan(2018) ,Hadi dan Putra (2019), Christiani (2020), Awan Dkk (2020), Supriono (2021) telah dirangkum menjadi kumpulan pemahaman akan terjadinya resistensi pada penelitian masing-masing.

Astuti (2012) “Menurut pemerintah penambangan pasir besi dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan rakyat Kulon

Progo. Sebaliknya, masyarakat pesisir menolak rencana tersebut karena tambang akan menggusur matapencaharian satu-satunya sebagai petani lahan pantai, juga menimbulkan kerusakan ekosistem pantai dan lingkungan serta membawa eksese sosial. Oleh sebab itu, muncullah konflik pasir besi antara masyarakat pesisir dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo” kebijakan akan pengelolaan sumber daya alam dikelola oleh pemerintah seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa *“Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Yang dapat dipahami bahwa pengelolaan dan penggunaan sumberdaya alam dilaksanakan dan kelola langsung oleh pemerintah sehingga ketika terjadi pemanfaatan lahan dengan dasar demi meningkatkan pendapatan daerah terkadang hanya melihat pada satu sisi yaitu peningkatan ekonomi pemerintah.

Sedangkan dalam praktiknya pemanfaatan yang menambah pemasukan daerah tidak melihat sisi pemanfaatan lahan sebelumnya, bahwasanya pemanfaatan itu telah dilakukan oleh masyarakat setempat seperti pada Kecamatan Kemalang yang merupakan daerah penambangan pasir dan batu yang dikelola oleh masyarakat secara traditional dan diambil alih oleh pemerintah sehingga pendapatan masyarakat tidak lagi sama dengan sebelumnya. Bahkan sebagian dari mereka meralih profesi karena tidak tahan dengan kerugian yang terus menerus dirasakan (Widyastomo 2013). Pada dasarnya tidak ada larangan

akan pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat jika diikuti oleh rehabilitas ekosistem disekitarnya. Sebagian pengelolaan pada sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat juga tidak sadar akan rehabilitas ini padahal secara turun temurun dikelola dan diwariskan oleh masyarakat dan menjadi sumber ekonomi tetap keluarga sehingga seharusnya kesadaran akan pengambilan sumberdaya alam.

Perusahaan memiliki percaya diri karena dibadani oleh izin pemerintah sehingga bagi masyarakat sekitar yang tidak memiliki badan hukum sering diabaikan perusahaan pada saat melakukan penolakan. Tidak jarang mereka juga melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan bersama. Pada kasus resistensi petani di Karangwuni Kulon Progo yang diawali oleh penolakan masyarakat karena mengambil alih lokasi penanaman di Kawasan pasir besi, akan tetapi dalam praktik penolakannya masyarakat lantas berujung pada penyelesaian masalah (Negosiasi) dengan landasan pada dasarnya lahan yang sedang ditempati juga awalnya milik Pemerintah. Jalan satu-satunya untuk tetap mendapatkan keuntungan yaitu menerima ganti rugi, sejumlah petani merasa hal ini adalah jalan yang paling aman untuk dilakukan (Suliadi 2015).

Menurut Nofri (2010:15) dalam Laela (2020) Kerusakan jalan disebabkan adanya repetisi atau pengulangan beban pada konstruksi jalan, kesalahan teknik pengerjaan, material yang digunakan tidak memenuhi standar spesifikasi, dan fenomena alam atau bencana alam. Kerusakan jalan merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita

sungguh besar terutama bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Penyebab kerusakan jalan antara lain adalah beban lalu lintas berulang yang berlebihan (*over loading*), panas/suhu udara, air dan hujan, serta mutu awal produk jalan yang jelek. Kerugian secara individu tersebut akan menjadi akumulasi kerugian ekonomi global bagi daerah tersebut. Seperti menjadi kewajaran untuk fasilitas disekitar penambangan pasir, seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa dari segi sosial, ekonomi maupun fasilitas yang dilalui oleh kendaraan penambangan menjadi masalah tersendiri. Kendaraan yang digunakan bukan seperti mobil pick up akan tetapi mobil dump truck dengan lebih dari 4 ban besar dan berat melebihi 1 ton, yang membuat fasilitas seperti jalanan yang biasanya dikendarai oleh masyarakat menjadi berlubang dan berdebu.

Namun berbeda halnya ketika penambangan itu dilakukan di Laut, yang transportasinya memakai kapal pengangkut pasir menimbulkan kerusakan lingkungan tersendiri seperti pencemaran air laut atau kondisi ekologis yang berubah. Awan Dkk (2020)

“Aktivitas penambangan pasir di Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dinilai menimbulkan kerusakan lingkungan seperti abrasi dan merusak biota laut.....Penyebab terjadinya konflik sosial masyarakat yaitu perbedaan antar individu dalam hal pemahaman dan reaksi terhadap masalah, perbedaan kepentingan dimana pelaku usaha mengutamakan keuntungan sedangkan masyarakat mengutamakan kerusakan lingkungan yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Selain itu juga perubahan sosial dalam hal musyawarah desa.”

## 2. Resistensi

KBBI<sup>1</sup>(Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan resistansi atau resistensi adalah bentuk ketahanan, sedangkan menurut Satriani dkk (2018) Resistensi dipahami sebagai sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan yang membentuk kenyataan dimana individu hidup. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang gerakannya.

Satriani, Juhaepa, dan Upe (2018) menjelaskan bahwa Resistensi dipahami sebagai sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan yang membentuk kenyataan dimana individu hidup. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang gerakannya. Selanjutnya Satriani Dkk membagi faktor penyebab resistensi kedalam beberapa faktor seperti ; Faktor kultur dan ekonomi, Faktor Struktur, Faktor Lingkungan Dan Sarana Sosial. Resistensi yang terbangun disaat isu *resettlement* dikeluarkan oleh pemerintah sebagai perpindahan sebagian penghuni pulau dikarenakan pulau sudah tidak dapat menampung sebagian dari mereka. Pemerintah menilai bahwa sebagian masyarakatnya kurang memahami dengan perubahan yang baru mereka akan ketinggalan dengan perubahan-perubahan yang ada sehingga keterbelakangan yang didapatkan. Segala strategi demi mempertahankan pemukiman masyarakatpun dilakukan sekitar 50% dari penduduk pulau.

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/resistensi>

Salah satu karya menarik tentang reproduksi stereotip dan resistensi oleh Tasrifin Tahara (2012), membahas tentang posisi Katobengke sebagai kelompok lapis bawah yang didominasi oleh kelompok Kaomu dan Walaka sebagai kelas dominasi. Kelompok kaomu dan walaka sebagai kelompok yang pernah berkuasa pada masa Kesultanan Wolio, ingin mempertahankan kekuasaan, *privilese*, dan *prestise* dengan stereotip orang Katobengke sebagai orang kotor, bodoh, kuat makan, lebar kaki, berpenyakit kudis dan budak (batua) sebagai stereotip yang bersifat internal. Stereotip seperti ini terus berlanjut sampai sekarang. Kelompok yang mendominasi berusaha mempertahankan posisi dan kedudukannya dalam sistem pemerintah serta pranata agama. Sementara Orang Katobengke sebagai kelompok yang didominasi berusaha melawan definisi yang diberikan kelompok kaomu-walaka. Bentuk bentuk perlawanan dengan mereposisi sistem pengetahuan Orang Wolio, resistensi lewat jalur pendidikan, politik, dan menggunakan simbol negara, sebagai ruang negosiasi status orang Katobengke dalam struktur masyarakat Buton.

“Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa” penelitian Peluso (2006) berlangsung di pulau Jawa, Buku ini menggambarkan keadaan dimana sumber daya alam yang merupakan milik rakyat, yang dititipkan pengelolaannya kepada negara melalui perusahaan pemerintah. Namun yang terjadi adalah pengelolaannya telah menyimpang, sehingga mengarah pada penguasaan

sumber daya alam yang semena-mena, dan berdampak pada pemelaratan rakyat disekitarnya. Peluso menguraikan sejarah kebijakan kehutanan negara yang dirancang untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan kawasan hutan, jenis pohon tertentu, dan tenaga kerja di Jawa, serta tanggapan penduduk desa hutan terhadap pengendalian yang diterapkan.

Peluso mencoba menjelaskan tentang bagaimana perlawanan dari masyarakat samin serta penyebaran ideologi samin pada petani-petani yang lain untuk tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat samin pada waktu itu berupa berbicara dalam bentuk teka-teki, penolakan membayar pajak, menolak membayar denda, menolak meninggalkan tanah sewa atau komunal ketika masa sewa sudah melebihi batas. Perlawanan ini merupakan bentuk protes masyarakat atas peraturan yang merugikan bagi mereka.

Seperti halnya peluso melihat petani di Jawa Tengah kasus lain para petani yang mempertahankan lahannya, Resistensi biasanya diawali oleh pandangan dan penilaian petani miskin yang terancam kehidupannya, karena lahan garapan yang semakin menyempit akibat dijual atau disewakan oleh pemiliknya pada orang lain seperti warga luar desa. Dikuasainya sawah pada orang lain ini akan mempersempit kesempatan dalam ikut mendapatkan hasil bumi dan pengelolaan sawah tersebut. Warga sebisa mungkin dalam berkonflik dan menunjukkan resistensinya pada penjualan sawah pada warga luar desa dengan tidak terbuka,

diam-diam, sembunyi-sembunyi dan lewat jalur belakang serta dengan ucapan sindiran. Mereka sangat menjaga keharmonisan yang ada. Konflik ada namun diatur oleh warga secantik mungkin, sehingga tidak muncul dipermukaan, yang pada akhirnya yang menjadi sasaran akan sadar dengan sendirinya dan berubah” Arrosyid (2017)

Dari contoh kasus diatas adanya pertahanan petani akan wilayah desa yang bisa mereka garap akan tetapi dialihkan kepada warga luar desa. Yang selanjutnya para tahap resistensi ini sama halnya dengan teori Scott akan adanya bentuk-bentuk resistensi.

James C. Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinant yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinant terhadap mereka. Seperti yang saya sebutkan diatas bahwa Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: 1) Perlawanan publik atau terbuka (*Public Transcript*), dan 2) Perlawanan tersembunyi atau tertutup (*Hidden Transcript*). Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan, bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinant dengan kelas-kelas superdinant.

Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinant dengan kelas- kelas superdinant (Susilowati 2018:5) .Menariknya dari teori

James C. Scott, Analisa resistensi sendiri terhadap suatu fenomena banyak melihat hal-hal yang ada dalam keseharian masyarakat baik berupa kisah-kisah, tema pembicaraan, umpatan, serta pujian dan perilaku yang lainnya sehingga resistensi menjadi gayung bersambut dalam keilmuan sosial.

Selanjutnya Hall dalam Susilowati (2018) seolah menegaskan bahwa resistensi bukan suatu kualitas tindakan yang tetap melainkan sebagai sesuatu yang relasional dan Kunjungkural (Bersiklus<sup>2</sup>). Artinya resistensi tidak dipahami sebagai sesuatu yang tunggal dan universal. Resistensi adalah sesuatu yang terbentuk oleh berbagai repertoar yang maknanya bersifat khas untuk waktu, tempat, dan hubungan sosial tertentu. Berdasarkan pendapat Hall, maka pengertian resistensi seharusnya didasarkan pada pemahaman tentang konteks dan historis masyarakatnya.

Resistensi Susilowati memiliki siklus dimana didalamnya terdapat serangkaian proses sehingga terbentuknya sistem saling mendukung dan terhubung. Contoh lain potret perlawanan yang muncul pada penelitian Suliadi (2015) yang menjelaskan tentang "**Menanam atau Melawan**" suatu kondisi dimana petani melakukan *Hidden Transkip* dengan tetap menanam tanaman dilokasi yang sudah diberitahukan akan dilakukan penambangan pasir besi. Selanjutnya masyarakat yang mengetahui hal tersebut sesekali membicarakan yang dimana hal ini adalah potret perlawanan masyarakat

---

<sup>2</sup> Siklus adalah suatu putaran waktu dimana didalamnya terdapat rangkaian proses yang berulang secara tetap dan teratur, sehingga membentuk sistem dimana bagian2nya terhubung dan saling mendukung

Karangwuni Kulon Progo tentang perusahaan dan pemerintah sekitar. Setelah muncul gosip maka secara spontan akan timbul penolakan yang dilakukan seperti demonstrasi atau menghalangi-halangi perusahaan dalam melakukan aktivitas penambangan.

Peneliti lantas menyimpulkan bahwa resistensi secara umum adalah bentuk penolakan terhadap suatu peraturan baru maupun kebijakan pemerintah serta adanya bentuk-bentuk perlawanan yang memperkuat resistensi itu sendiri. Namun ada pula resistensi yang berlangsung secara lama hingga saat ini masih, bisa dikatakan perlawanan tidak terbatas oleh waktu dan tidak memiliki akhir pada kasus resistensi. Oleh karenanya perlu peng up to date segala bentuk gerakan atau aksi yang dilakukan masyarakat dalam menolak kebijakan penguasa / kaum dominan.

Dalam sebuah buku berjudul Gerakan sosial menyinggung adanya bentuk resistensi yang sama, ibarat anak kembar tidak selalu identik dan bisa berkembang sesuai zamannya bentuk penolakan disetiap kasus dapat diintervensi berbeda-beda di kondisi tertentu sehingga penulis menyinggung sedikit akan gerakan sosial yang juga didalamnya terdapat resistensi masyarakat.

## **2.1 Resistensi Terhadap Gerakan Sosial**

Sukman (2016) Setiap peristiwa gerakan sosial (*social movements*), selain ada pihak yang mendukung, juga tidak akan lepas dari adanya pihak yang menentang atau menolak. Menurut Locher (2002: 238) dalam

Sukman (2016) “mengingat bahwa semua peristiwa gerakan sosial (*Social movements*) menginginkan adanya suatu perubahan atau untuk menjaga sesuatu agar tidak berubah, maka di dalamnya akan ada orang atau pihak yang tidak menginginkan suatu gerakan sosial (*social movements*) berhasil”. Perlawanan atau penolakan yang paling besar terhadap suatu gerakan sosial (*social movements*) biasanya berasal dari mereka yang diuntungkan apabila gerakan tersebut mengalami kegagalan, umumnya politisi atau pemimpin sosial (*political and social leaders*). Selanjutnya, Locher (Locher, 2002: 239-243) dalam Sukmana (2016) menyebutkan terdapat Empat bentuk resistensi terhadap suatu gerakan sosial (*social movements*), yakni: (1) *Ridicule* (Ejekan); (2) *Co-option* (Kooptasi); (3) *Formal Social Control* (Kontrol Sosial Formal); dan (4) *Violence* (Kekerasan).

Penjelasan masing-masing bentuk resistensi terhadap Gerakan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

**2.1.1 *Ridicule* (Ejekan):** *Ridicule* (ejekan) bisa menjadi cara yang sangat efektif dalam menolak atau melawan suatu gerakan sosial (*social movements*). Mengejek pemimpin gerakan, pengikut, dan atau tujuan gerakan, dengan cara melecehkan gerakan di mata orang lain dalam suatu masyarakat atau komunitas. Talk show, komedi, kartun politik, dan komentator, semuanya bisa menjadi media ejekan terhadap gerakan sosial yang dilakukan oleh mereka yang tidak menyukai gerakan tersebut. Penggunaan ejekan (*ridicule*) bukanlah suatu hal yang kebetulan, akan

tetapi secara hati-hati digunakan untuk merusak suatu gerakan. Ejekan (*ridicule*) atas suatu isu sosial bisa melalui dua cara, yakni: para pengikut dan pendukung seringkali mengejek pihak lawan mereka dalam rangka upaya untuk melawan hilangnya harga diri mereka. Sementara di sisi lain, para pemimpin dan para pengikut (*leaders and followers*) yang menentang gerakan seringkali mengejek yang lainnya dengan tujuan untuk merusak gerakan itu sendiri.

**2.1.2 Co-Opting (Kooptasi):** Mengkooptasi sesuatu berarti mengambil sesuatu untuk suatu tujuan diri sendiri atau untuk menarik lawan ke dalam sisi sendiri. Dalam kasus gerakan sosial (*social movements*), *Co-Opting* (Kooptasi) mengacu kepada bagaimana membentuk suatu kelompok yang relatif kuat tampak seperti bekerjasama dalam suatu gerakan sosial, atau menjadikan suatu organisasi gerakan sosial menjadi organisasi yang netral. Upaya ini bisa melalui dua cara, yakni: *Pertama*, suatu kelompok dapat membentuk sebuah organisasi yang memiliki nama sama dengan organisasi gerakan sosial yang sudah ada, dan kemudian merilis pernyataan press; *Kedua*, kelompok yang kuat sewaktu-waktu bisa disuap atau mencoba membujuk para pemimpin gerakan untuk bergabung dengan mereka. Pembentukan organisasi dengan nama yang sama dengan organisasi gerakan sosial yang sudah ada bertujuan untuk membingungkan publik. Publik akan bingung mana yang harus dipercaya, apakah pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasi gerakan sosial atau pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasi oposisi gerakan. Sedangkan

cara yang kedua yakni dengan mengajak pemimpin gerakan untuk bergabung dengan oposisi, mungkin seorang pemimpin gerakan sosial didorong oleh rasa kebenaran tetapi mereka mungkin juga sebenarnya sedang mencari kekayaan, ketanaran, atau kemuliaan. Motivasi pemimpin yang seperti ini, maka akan mudah dipersuasi untuk bergabung dengan pihak oposisi, mereka bisa diberi status pekerjaan yang lebih baik dalam organisasi, perusahaan, atau birokrasi

**2.1.3 Formal Sosial Control (Kontrol Sosial Formal):** Gerakan sosial (*social movements*) seringkali menghadapi resistensi dari pihak yang berwenang karena tujuan Gerakan sosial tersebut adalah menginginkan terjadinya suatu gerakan sosial yang justru tidak diinginkan oleh para pemimpin sosial dan politik (*social and political leaders*). Terdapat beberapa cara yang berbeda bagaimana kontrol sosial formal melalui legitimasi wewenangnya digunakan dalam menentang Gerakan sosial. Secara umum, ada dua kategori dari kontrol sosial formal yakni: *legitimate force* (legitimasi kekuatan) dan *laws and ordinances* (hukum dan peraturan). *Legitimate force* dapat berupa Polisi, Anggota Keamanan Nasional, dan tentara, semuanya bisa diperintahkan oleh atasan mereka untuk menggunakan *legitimate force* (legitimasi kekuatan) dalam rangka meredam aktivitas publik. *Laws and ordinances* (hukum dan peraturan); umumnya penggunaan formal social control tidak berupa bentuk fisik, akan tetapi berupa penegakan atas hukum dan peraturan yang ada 4. **Violence (Kekerasan):** *Physical Violence* (kekerasan fisik) adalah bentuk yang

paling ekstrim dari berbagai bentuk resistensi terhadap gerakan sosial. Kadang-kadang, violence merupakan pilihan terakhir, akan tetapi seringkali menjadi garis pertahanan utama dalam menentang gerakan sosial. Kekerasan terhadap para pemimpin gerakan sosial atau para pengikut gerakan sosial, bisa berasal dari individu, bias berasal dari organisasi gerakan sosial yang lainnya, atau bias berasal dari pemerintah (*government*).

Sukman (2016) Skala resistensi sangat bervariasi, tindakan resistensi bisa menjadi individual atau kolektifitas, luas atau memiliki terbatas secara lokal. Terkait dengan skala adalah level dari koordinasi (*level of coordination*) antara pihak-pihak yang melawan (*resisters*), yaitu sejauh mana mereka sengaja melakukan tindakan secara bersama. Sementara revolusi dan aktivitas protes terorganisir lainnya secara jelas mensyaratkan koordinasi, tindakan perlawanan lainnya (seperti pilihan gaya rambut atau konfrontasi di tempat kerja) tidak begitu memerlukan adanya koordinasi antar aktor. Target dari perlawanan juga bervariasi, dari individual kepada kelompok, bisa juga dari organisasi kepada institusi dan struktur sosial. Sumber perbedaan yang lainnya adalah tentang arah dan tujuan (*direction or goals*) dari perlawanan. Sementara perlawanan seringkali dipahami ditujukan untuk mencapai beberapa perubahan jangka pendek, dalam beberapa kasus perilaku yang digambarkan sebagai perlawanan bertujuan untuk mengurangi perubahan.

Sebagai contoh, perlawanan kultural (*cultural resistance*) pada komunitas minoritas bertujuan untuk mempertahankan budaya minoritas terhadap asimilasi dengan budaya lokal. Lebih lanjut, perubahan dengan tuntutan resistensi sering dianggap menjadi progresif atau setidaknya prososial, sebagai bentuk penolakan dominasi dari atas. Sementara, sejumlah penulis mencatat bahwa perlawanan dapat juga berasal dari mereka yang memiliki kekuasaan lebih atau yang memiliki tingkatan kedudukan yang lebih tinggi. Perlawanan bisa juga berupa perlawanan Kanan dan perlawanan Kiri antisosial, kekerasan rasial, dan bahkan pemerkosaan.

Terakhir, ketika perlawanan secara umum dipahami sebagai tindakan politik (*political action*), beberapa penulis menjelaskan bahwa perlawanan dapat juga menjadi berbasis-identitas (*identity-based*). Howe (1988) menyatakan tentang strategi diskursif digunakan oleh pria pengangguran jangka panjang di Belfast untuk menolak dicap sebagai pengemis atau penipu, dalam hal apa yang ditolak bukan hanya kondisi politik atau kondisi sosial akan tetapi juga para penentang dikaitkan dengan identitas.

Holander dan Einwohner (2004: 539) menyatakan bahwa secara umum ada dua elemen inti dalam perlawanan, yakni: (1) tindakan (*action*); dan (2) oposisi (*opposition*). Tindakan (*action*) dipahami dalam konteks yang lebih luas, yakni mengacu tingkah laku aktif (*active behavior*), apakah

itu bersifat verbal, kognitif, maupun fisik. Sementara oposisi (*opposition*) mengacu pula kepada istilah-istilah lain, seperti: membalas (*counter*), bertentangan (*contradict*), perubahan sosial (*social change*), penolakan (*reject*), tantangan (*challenge*), subversif (*subversive*), dan kerusakan dan/atau gangguan (*damage and/or disrupt*). Rubin (1996: 245) dalam Sukmana (2016) menyatakan bahwa perlawanan adalah tindakan yang melibatkan kesadaran, aksi kolektif, dan penentangan langsung terhadap struktur kekuasaan.

Dengan demikian perlawanan meliputi aktivitas dimana aktivitas tersebut terjadi sebagai kebalikan (oposisi) atas seseorang atau sesuatu yang lainnya. Perlawanan dikelompokkan dalam beberapa tipe (Holander & Einwohner, 2004: 544-547). Tipe-tipe perlawanan meliputi:

1. Perlawanan terbuka (*Overt resistance*), adalah tingkah laku yang terlihat dan mudah dikenali baik oleh target (*targets*) dan pengamat (*observers*) sebagai perlawanan. Kategori ini meliputi tindakan-tindakan kolektif termasuk seperti gerakan sosial dan revolusi, maupun tindakan individu untuk melakukan penolakan seperti perlawanan perempuan dalam menolak pekerjaan rumah tangga, atau melawan secara fisik terhadap kekerasan seksual;
2. Perlawanan tertutup (*Covert resistance*), mengacu kepada tindakan yang disengaja akan tetapi tidak diketahui oleh target, meskipun mereka diakui sebagai perlawanan oleh orang lain.

Sebagai contoh dari bentuk perlawanan tertutup adalah gosip (*gossip*), omelan (*bitching*), dan subversi halus di tempat kerja

3. Perlawanan tidak disadari (*Unwitting resistance*), tipe ini tidak dimaksudkan sebagai perlawanan oleh aktor dan belum dirasakan sebagai ancaman oleh target. Tipe ini merupakan suatu tindakan yang tidak disengaja dan tidak memiliki target khusus tertentu. Titik poinnya adalah mungkin ada beberapa orang yang merasa keberatan atau terancam; terlepas dari apakah aktor bermaksud untuk melakukan provokasi atau tidak;

4. Perlawanan target-tetap (*Target-defined resistance*), yakni perlawanan yang hanya satu orang yang mengakui suatu tingkah laku sebagai perlawanan. Misalnya, suami yang kasar bisa menilai tingkah laku istriya sebagai resistensi;

5. Perlawanan eksternal (*External-defined resistance*), yakni tindakan-tindakan perlawanan yang tidak dimaksudkan atau diakui sebagai perlawanan oleh aktor (pelaku) atau target mereka, tetapi diberi label perlawanan oleh pihak ketiga

6. Perlawanan terjawab (*Missed resistance*), yakni bentuk tindakan-tindakan perlawanan yang diakui oleh target sebagai perlawanan meskipun oleh pihak ketiga tidak diakui sebagai perlawanan; dan

7. Perlawanan berusaha (*Attempted resistance*), yakni mengacu kepada tindakantindakan aktor yang ditujukan untuk perlawanan namun tidak diakui sebagai tindakan perlawanan baik oleh target (*targets*) maupun para pengamat (*observers*).

### **3. Penambangan Pasir Laut**

#### **3.1 Nelayan**

Sedangkan Konsep Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perikanan, nelayan adalah sumberdaya manusia yang memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan operasi penangkapan ikan. Sedangkan menurut Satrawidjaja (2002) dalam Kemong (2015), nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai 19 atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir. Menurut MJ (2011) dalam Kemong (2015) ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut:

1. Segi mata pencaharian. Nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir. Atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
2. Segi cara hidup. Komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut

pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.

3. Segi keterampilan. Meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana.

Menurut peneliti bahwa masyarakat nelayan adalah mereka yang mempunyai mata pecaharian hidup dengan memanfaatkan sumber daya laut seperti ikan dan biotik laut lainnya (kecuali rumput laut) yang mengandung nilai ekonomis (dapat dikonsumsi dan dipasarkan) baik secara terus menerus maupun secara musiman, dengan menggunakan sarana seperti perahu dan alat-alat tangkap.

Sebab itu nelayan menggantungkan hidupnya pada kesatuan ekosistem laut sebagai kesatuan ekonomi sosial. Tidak heran ketika munculnya kegiatan yang menghambat atau merugikan masyarakat pesisir khususnya nelayan mereka sangat rentan akan protes hingga pengusiran secara langsung di laut.

Pada beberapa penelitian tentang penambangan tidak jarang mereka (peneliti terdahulu) lebih menitikberatkan pada daerah agraris seperti yang sudah saya sebutkan diatas. Padahal penambangan pasir laut juga salah satu sumberdaya alam yang sudah mulai diincar oleh investor dalam membangun pulau baru pada masing-masing Kota besar.

### 3.2 Penambangan Pasir Laut

Pasir laut merupakan salah satu sumberdaya alam non hayati apabila dikelola dengan baik, memiliki prospek dimasa mendatang untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan dan perdagangan pasir laut selama ini cenderung tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan keterpurukan nelayan akibat dampak dari terganggunya ekosistem di wilayah tangkap pesisir (Rahmad 2018).

Penggunaan pasir laut khususnya pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya membawa manfaat bagi aktivitas ekonomi karena memberikan akses produksi dan distribusi barang dan jasa untuk melayani konsumsi masyarakat (S. Sartono, 2019). Demikian pula dengan reklamasi pantai untuk pengembangan pusat industri dan pemukiman (Ismar Hi Garuan & S. Suranto, 2016). Pada Tahun 2017 permintaan akan konstruksi pembangunan di pesisir sisi selatan Kota Makassar membuat tren baru pada sejarah pembangunan di Kota *Angging Mamiri* ini. Akibatnya terjadi peningkatan kebutuhan material berupa pasir untuk penimbunan. Lain halnya dengan aktivitas penambangan pasir di wilayah pesisir pantai Galesong, Kabupaten Takalar, untuk menimbun kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) dan New Port Makassar (NPM).

Namun, aktivitas penambangan pasir ini telah memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar (Anggriani dkk 2020).

Serasa berbeda tapi taksama dengan Anggriani, Tanuri (2020) melihat adanya keganjalan dalam penambangan pasir laut yaitu, “Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir laut adalah Meningkatkan abrasi pantai and erosi pantai, Menurunkan kualitas lingkungan perairan laut, Semakin meningkatnya pencemaran pantai, Penurunan kualitas air yang menyebabkan semakin keruhnya air laut, Rusaknya wilayah pemijahan dan daerah asuhan, Menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan dan Meningkatkan intensitas banjir air rob terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut.maka dalam kegiatan pertambangan perlu adanya pengaturan yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu instrumen hukum yang dipergunakan oleh pemerintah adalah perizinan”

Jika Anggriani melihat penambangan pasir laut yang terjadi memerlukan pengawasan hingga pada praktiknya penambangan pasir laut berlangsung dengan aturan yang sudah ditetapkan. Padahal selain laut menjadi sumberdaya alam yang digunakan hampir seluruh masyarakat akan tetapi ada sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau dan menaruh harapan besar akan kelangsungan ekosistem nya.

Sehingga kebijakan yang dianggap tidak mengikut sertakan masyarakat pesisir khususnya nelayan dalam mengambil keputusan akan

lokasi pertambangan dirasa sangat sepihak. Karena setelah penambangan terjadi maka akan timbul berbagai macam bencana yang pastinya dirasakan pertama oleh masyarakat pesisir. Akan tetapi lagi-lagi aktor seperti perusahaan dan kekuasaan pemerintah dalam mengambil kebijakan memiliki power yang sangat besar sehingga nelayan hanya bisa melakukan *Hidden Transkip* hingga sesekali *Public Transkip* jika merasa mulai terganggu atau terdorong oleh aktor yang memiliki kepentingan.

Dalam beberapa kasus penambangan yang terjadi di Indonesia, kaum subordinat akan mengalami krisis kepercayaan dalam melakukan aksi dikarenakan potensi dan power yang mereka miliki dianggap tidak cukup kuat. Lalu munculnya elit lokal sebagai bagian dari kelompok tersebut yang memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam mengontrol beberapa hal dalam masyarakat (seperti : ekonomi) untuk membantu mereka sehingga terjalinlah sikap-sikap kritis atas kepentingan bersama seperti menolak penambangan pasir yang didalangi oleh para kaum superordinat (Pemerintah).

Oleh karenanya menurut saya teori hegemoni dari gramsci dan resistensi dari scott sangat sesuai untuk digunakan memahami fenomena gerakan resistensi masyarakat nelayan di Pulau Kodingareng Lompo ketika merespon kegiatan penambangan pasir laut yang berada di wilayah penangkapan ikan mereka.

#### 4. Punggawa Sawi

Sebagaimana halnya dengan mata pencarian hidup pertanian di daerah pedalaman, masyarakat pesisir juga mengenal adanya kelompok social punggawa-sawi. Kedua pihak ini selalu berdampinga dan bekerja sama dalam suatu komunitas pedesaan untuk menolah sumber daya perikanan. Beberapa factor terkait Punggawa-Sawi, antara lain :

1) Punggawa adalah pemilik modal produksi yang dapat membantu dengan cara mempekerjakan sejumlah sawi. Sementara itu sawi umumnya adalah pekerja yang hanya mengandalkan tenaga. Mereka tidak memiliki modal cukup seperti yang dimiliki oleh punggawa, karena itu mereka butuh bantuan punggawa untuk menyambung hidup.

2) Punggawa selain menguasai produksi juga menguasai proses pemasaran.

3) Kedua kelompok ini biasanya diikat oleh hubungan kekerabatan, sekampung atau searifin darah. Menurut (Arifin Salatang ; 1982 : Mattulada 1981 : Pellrass : 1981) model hubungan Punggawa Sawi ini identik dengan patron Klien dari Scoot dalam Heddy (1988 : 2) mengemukakan: "Patron Klien adalah suatu kasus khusus hubungan antara dua orang atau kelompok yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, dimana seorang yang lebih ke tinggi kedudukan sosial ekonominya (Patron), menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk memberikan perlindungan /keuntungan atau keduanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya atau Klien yang pada

gilirannya membalas pemberian tersebut dengan meng umum dan bantuan termaksud jasa pribadi kepada patron.” Dalam sistem penangkapan masyarakat nelayan dari ketiga atau berlaku organisasi kelompok kerja Punggawa-Sawi. Hubungan kerja yang berlaku dalam kelompok nelayan ini pada dasarnya bersifat hubungan ekonomi selain itu hubungan tersebut juga bersifat social bahkan lebih permanen, yang terjadi bukan saja dalam satu periode penangkapan, hal ini khususnya berlaku antara Bos/Punggawa laut yang memberikan pekerjaan kepada sawi (Buryan 1997:173-174) Pola hubungan Punggawa Sawi dibangun atas prinsip sosial.

Dengan demikian punggawa memegang peranan bagi anggotanya yaitu sebagai pemimpin bagi anggotanya yaitu sebagai pemimpin bagi anggotanya dan sebagai penghubung bagi yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pola hubungan kerja antara punggawa dengan sawi dapat di bedakan menurut ruang dan waktu. Maksudnya bahwa punggawa apabila sedang berada di darat maka ia sekaligus berfungsi sebagai orang tua yang karena kemampuan profesinya sehingga ia di anggap mempunyai nilai tinggi.

Punggawa Kapal merupakan nelayan bebas atau orang yang mempunyai modal dan kapal motor dengan kapasitas 4-5 orang yang bekerja untuk keluarganya sendiri atau terkadang mereka bertugas mengambil ikan. Sedangkan Sawi adalah orang yang bekerja pada punggawa kapal dalam praktek penangkapan ikan. Organisasi Punggawa

Sawi pada prinsipnya merupakan organisasi yang terbentuk secara formal, yang pada hakekatnya juga mengatur hubungan dan tata kerja sebagaimana layaknya organisasi lain.

Dalam proses pengaturan hubungan dan tata kerja ini, organisasi Punggawa-Sawi memiliki beberapa komponen/unsur utama yang memainkan peran yang sama pentingnya, yaitu: Punggawa/Bos/Juragan dan Sawi. Hubungan tersebut merupakan hubungan kerja yang banyak melibatkan hubungan kerja yang banyak melibatkan hubungan social lainnya. Seorang Sawi dapat bias dari kerabat,teman maupun tetangga dari punggawa. Sedangkan punggawa adalah seorang bapak yang mesti dipatuhi perintah dan larangannya, namun ia juga senantiasa ikut dan kesulitan para Sawinya (Bungatali 1995:69).

Menurut Ahimsa 1988:4 dalam buku MINAWANG hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan, "Sifat tatap-muka relasi patronase menunjukkan bahwa sifat pribadi terdapat di dalamnya. Memang hubungan timbale balik yang berjalan trus dengan lancer akan menimbulkan rasa simpati (*affection*) antar kedua belah pihak, yang selanjutnya membangkitkan rasa saling percaya dan rasa dekat. Dekatnya hubungan ini kadangkala diwujudkan dalam penggunaan istilah panggilan yang akrab bagi patnernya. Dengan adanya rasa saling percaya ini seorang klien dapat mengharapkan bahwa patron akan membantunya jika mengalami kesulitan, jika dia memerlukannya. Dengan demikian walaupun hubungan ini bersifat instrumental".

Hubungan instrumental yang dimaksudkan ialah hubungan dimana seseorang yang tinggi kedudukannya secara ekonomi maupun social menggunakan pengaruhnya untuk memberi perlindungan kepada klien yang mana kedudukan klien lebih rendah dan diberikan balasan sebagai bentuk jasa-jasa, bantuan, atau dukungan kepada patron. Hal tersebut juga di dapatkan pada hubungan Punggawa-Sawi dimana seorang Bos/Punggawa sebagai Patron yang memiliki modal dan kedudukan social yang tinggi memberikan pekerjaan maupun bantuan dalam bentuk perhatian atau uang yang akan dibalas oleh sawi dengan bekerja pada kapal Punggawa dan memberikan dukungan jika saja Punggawa ingin mengecam jabatan lain dalam artian Punggawa terjun ke dunia politik atau hanya sekedar membantu hal-hal yang memerlukan tenaga banyak pada beberapa kegiatan yang diselenggarakan Punggawa..